

# AKREDITASI MUI PROVINSI JAWA TIMUR 2022



**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

## KATA PENGANTAR

### KETUA UMUM MUI JAWA TIMUR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Program akreditasi ini adalah program Majelis Ulama Indonesia yang pertama kalinya di Indonesia. Sejak awal, Dewan Pimpinan (DP) MUI Jawa Timur memiliki planning untuk menjalankan program ini. Akhirnya, melalui peran KP3 MUI Jawa Timur, program akreditasi ini dapat dijalankan. Bahkan, instrumen akreditasi yang disusunnya telah dipresentasikan di depan Dewan Pengurus MUI Jawa Timur, sehingga sudah berstandar nasional.

Program akreditasi ini menjadi penunjang tugastugas MUI sebagaimana tercantum dalam PD/PRT, yaitu sebagai *shodiqul hukumah* (mitra pemerintah) dan *khodimul ummah* (pembimbing dan pelayan umat). MUI disebut sebagai mitra pemerintah, karena MUI harus memiliki relasi harmoni antara MUI dan pemerintah setempat. Sementara, pelayan umat berarti bahwa MUI harus mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bagi umat.

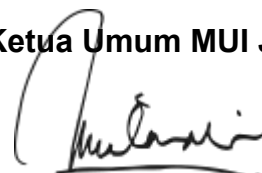
Saya meminta agar program akreditasi ini dapat diikuti dengan baik dan semaksimal mungkin oleh MUI kabupaten/kota se-Jawa Timur, mengingat tantangan ke depan tidaklah mudah, terutama di bidang aqidah dan kebangsaan demi mempertahankan NKRI.

Akhirnya, sambutan ini saya tutup dengan pantun akreditasi.

Tahu campur dibumbui terasi  
Elvi Sukaesih mobilnya Mercy  
MUI Jatim terus berkonsolidasi  
Menata organisasi dengan sistem akreditasi.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.*  
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

**Ketua Umum MUI Jawa Timur**



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

## DAFTAR ISI

**COVER ~ 1**

**KATA PENGANTAR ~ 2**

**DAFTAR ISI ~ 3**

**BAB 1       PENDAHULUAN ~ 3**

- A. Latar Belakang ~ 5
- B. Maksud dan Tujuan ~ 5
- C. Sasaran ~ 5
- D. Ruang Lingkup ~ 5

**BAB 2       PRINSIP DAN INSTRUMEN AKREDITASI ~ 6**

- A. Prinsip ~ 6
- B. Instrumen Akreditasi ~ 6

**BAB 3       PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENGHARGAAN ~ 12**

- A. Tim Penilai ~ 12
- B. Pelaksanaan Akreditasi ~ 12
- C. Penghargaan ~ 13

**BAB 4       PENUTUP ~ 14**

**LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN AKREDITASI ~ 15**

**KODE ETIK ~ 19**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akreditasi MUI diselenggarakan oleh MUI Propinsi Jawa Timur merupakan aktivitas untuk mengevaluasi dan memberikan apresiasi kepada MUI Kabupaten/Kota yang mampu mengelola organisasi dengan baik sesuai AD/ART MUI. Kemampuan mengelola organisasi dapat dilihat dari berbagai dokumen mutu berbagai kegiatan: baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi yang disiapkan secara matang. Kelengkapan dokumen manajemen organisasi tersebut tentunya akan dibarengi dengan prestasi dan kontribusi positif pada lingkungan sekitar, khususnya Umat Islam.

Melalui akreditasi MUI di lingkungan MUI Propinsi Jawa Timur diharapkan memberikan manfaat bagi pengelolaan keorganisasian berdasarkan manajemen mutu. Tidak hanya pada persoalan administrasi, melainkan juga bagaimana program kerja diselenggarakan secara terukur, sehingga indicator capaian kinerja dapat ditentukan.

Sesuai amanat dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga MUI, setiap organisasi MUI di semua level/tingkatan memiliki ranah dan semangat perjuangan yang sama yang bersumber dari semangat menyebarkan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Implementasinya terlihat dalam setiap ruang pengabdian sebagai medan perjuangan social. Pelaksanaan program kerja menjadi bagian penting yang untuk dievaluasi, agar organisasi berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai organisasi keagamaan, maka kinerja MUI harus disemangati oleh nilai-nilai keislaman yang moderat/wasathiyah yang telah menjadi watak dasar keberagamaan Islam di Indonesia. Kinerja MUI harus disemangati bahwa implementasi ajaran Islam dan nilai kebangsaan harus menjadi bagian penting dalam mengelola organisasi, termasuk menjalankan program kerjanya.

Apresiasi kepada MUI Kabupaten/Daerah yang memiliki kontribusi dan peran penting dalam masyarakat merupakan bentuk penghargaan atas kinerja kader dalam menerjemahkan peran dan tugasnya selama ini. Prestasi dan

kontribusi MUI kabupaten/kota ditengah-tengah masyarakat, serta bagaimana membangun hubungan baik intra maupun ekstra kelembagaan adalah bukti dari adanya kinerja yang sudah terbentuk selama ini.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Mewujudkan standar organisasi MUI yang sesuai dengan Pedoman Organisasi
2. Sebagai pedoman pengukuran kinerja organisasi MUI dapat dilakukan secara objektif dan terukur
3. Memberikan apresiasi kepada kinerja MUI kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur
4. Menjadi dasar bagi upaya pengembangan organisasi
5. Menjadi big data keorganisasian MUI di lingkungan Propinsi Jawa Timur

## **C. Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya akreditasi kinerja MUI Kabupaten/Daerah secara efektif, sehingga penilaian dapat menghasilkan suatu organisasi yang mempunyai kinerja terbaik

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penilaian Akreditasi MUI Propinsi Jawa Timur meliputi Komponen Standar Manajemen Organisasi (Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Sumberdaya, Pengelolaan Keuangan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, Pengawasan, Keterukuran Program Kerja), Pelayanan, Inovasi dan Prestasi, serta Hubungan Kerjasama

## BAB 2

### PRINSIP DAN INSTRUMEN PENILAIAN

#### A. Prinsip

Penyelenggaraan Akreditasi MUI Propinsi Jawa Timur merupakan kegiatan dalam rangka untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja yang dijalankan organisasi. Dalam pelaksanaan penilaian Akreditasi MUI Propinsi Jawa Timur dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Transparan artinya metode dan hasil penilaian harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Konkrit artinya penilaian kinerja MUI yang ditetapkan bersifat nyata dan jelas capaiannya;
3. Konsisten artinya pelaksanaan penilaian memperhatikan ketersediaan data, informasi dan kelengkapan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam penilaian;
4. Obyektif, artinya penilaian dilaksanakan secara profesional dan bebas dari kepentingan pribadi dan atau golongan;
5. Akuntabel artinya hal-hal yang diatur dalam penilaian Akreditasi MUI Propinsi Jawa Timur harus dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan

#### B. Instrumen Akreditasi

No	Instrumen	Uraian	Bobot
1	Manajemen Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Pengurus</li><li>2. Perencanaan: (renstra meliputi: visi, misi, tujuan, strategi, program kerja jangka menengah)</li><li>3. Organisasi dan Tata Laksana (struktur dan susunan organisasi, tupoksi)</li><li>4. Program Kerja dan Indikator Capaian (dokumen program kerja tahunan)</li><li>5. Pengelolaan Keuangan (dokumen laporan keuangan, sumber keuangan)</li><li>6. Pelaporan Kinerja (dokumen</li></ol>	30 %

		LPJ kegiatan tahunan) 7. Sumber Daya Manusia (pengurus harian, tenaga admin sekretariat)	
2	Pelayanan	1. Fatwa Keagamaan 2. Konsultasi Keagamaan 3. Tausiyah (himbauan) 4. Mubaligh/Dai 5. Kajian/Penelitian terhadap aliran keagamaan dan isu kontemporer 6. Pendampingan Sertifikasi Halal 7. Pendampingan bagi Kelompok Rentan (perempuan, anak, masyarakat berpenghasilan rendah, pengangguran, muallaf, difabel, dsb)	20 %
3	Inovasi dan Kepeloporan	1. Program Unggulan 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Teknologi Digital (penggunaan medsos sarana dakwah) 3. Bentuk kegiatan untuk Generasi MUIlenial 4. Pemanfaatan media cetak dan elektronik untuk berdakwah (Buletin, Majalah, TV, Radio dll) 5. Menjadi Rujukan MUI Kabupaten/kota lainnya (studi banding pengelolaan)	20 %
4	Hubungan Kerjasama non pemerintah	1. Sinergi Program Kerja antar lembaga di internal MUI 2. Kemitraan dengan Ormas Keagamaan 3. Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri 4. Kemitraan dengan lembaga internasional	20 %
5	Dukungan Pemerintah Daerah/Kota	1. Sarana dan Prasarana (kantor dan kelengkapan fasilitas) 2. Program atau kegiatan sebagai bentuk dukungan pemerintah	10 %

## INDIKATOR PENILAIAN

No	Aspek Penilaian	Uraian	Bobot	Skor	Hasil Penilaian
1	Manajemen Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pengurus</li> <li>2. Perencanaan: (renstra meliputi: visi, misi, tujuan, strategi, program kerja jangka menengah)</li> <li>3. Organisasi dan Tata Laksana (struktur dan susunan organisasi, tupoksi)</li> <li>4. Program Kerja dan Indikator Capaian (dokumen program kerja tahunan)</li> <li>5. Pengelolaan Keuangan (dokumen laporan keuangan, sumber keuangan)</li> <li>6. Pelaporan Kinerja (dokumen LPJ kegiatan tahunan)</li> <li>7. Sumberdaya Manusia (pengurus harian, tenaga admin sekretariat)</li> </ol>	30%		
2	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatwa Keagamaan</li> <li>2. Konsultasi Keagamaan</li> <li>3. Tausiyah (himbauan)</li> <li>4. Mubaligh/Dai</li> <li>5. Kajian/Penelitian terhadap aliran keagamaan dan isu kontemporer</li> <li>6. Pendampingan Sertifikasi Halal</li> <li>7. Pendampingan bagi Kelompok Rentan (perempuan, anak, masyarakat berpenghasilan rendah, pengangguran, muallaf, difabel, dsb)</li> </ol>	20%		
3	Inovasi dan Kepeloporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Unggulan</li> <li>2. Pemanfaatan Sistem</li> </ol>	20%		



		<p>Informasi Manajemen (SIM) berbasis Teknologi Digital (penggunaan medsos sarana dakwah)</p> <p>3. Bentuk kegiatan untuk Generasi MUIlenial</p> <p>4. Pemanfaatan media cetak dan elektronik untuk berdakwah (Buletin, Majalah, TV, Radio dll)</p> <p>5. Menjadi Rujukan MUI Kabupaten/kota lainnya (studi banding pengelolaan)</p>			
4	Hubungan Kerjasama non pemerintah	<p>1. Sinergi Program Kerja antar lembaga di internal MUI</p> <p>2. Kemitraan dengan Ormas Keagamaan</p> <p>3. Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri</p> <p>4. Kemitraan dengan lembaga internasional</p>	20%		
5	Dukungan Pemerintah Daerah/Kota	<p>1. Sarana dan Prasarana (kantor dan kelengkapan fasilitas)</p> <p>2. Program atau kegiatan sebagai bentuk dukungan pemerintah</p>	10%		

### Ketentuan Penilaian (Skor)

Cukup :  $\leq 60$

Baik : 61 - 80

Unggul : 81 - 100

## RINCIAN PENILAIAN

Manajemen Organisasi	Kelengkapan Dokumen			Skor	Uraian
	Cukup	Baik	Unggul		
1	2	3	4	5	6
SK Pengurus					
Perencanaan: (renstra meliputi: visi, misi, tujuan, strategi, program kerja jangka menengah)					
Organisasi dan Tata Laksana (struktur dan susunan organisasi, tupoksi)					
Program Kerja dan Indikator Capaian (dokumen program kerja tahunan)					
Pengelolaan Keuangan (dokumen laporan keuangan, sumber keuangan)					
Pelaporan Kinerja (dokumen LPJ kegiatan tahunan)					
Sumberdaya Manusia (pengurus harian, tenaga admin sekretariat)					
<b>Total</b>					

PELAYANAN	Kelengkapan Dokumen			Skor	Uraian
	Cukup	Baik	Unggul		
1	2	3	4	5	6
Fatwa Keagamaan					
Konsultasi Keagamaan					
Tausiyah (himbauan)					
Mubaligh/Dai					
Kajian/Penelitian terhadap aliran keagamaan dan isu kontemporer					
Pendampingan Sertifikasi Halal					
Pendampingan bagi Kelompok Rentan (perempuan, anak, masyarakat berpenghasilan rendah, pengangguran, muallaf, difabel, dsb)					
<b>Total</b>					

INOVASI DAN KEPELOPORAN	Kelengkapan Dokumen			Skor	Uraian
	Cukup	Baik	Unggul		
1	2	3	4	5	6
Program Unggulan					
Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Teknologi Digital (penggunaan medsos sarana dakwah)					
Bentuk kegiatan untuk Generasi MUIlenial					
Pemanfaatan media cetak dan elektronik untuk berdakwah (Buletin, Majalah, TV, Radio dll)					
Menjadi Rujukan MUI Kabupaten/kota lainnya (studi banding pengelolaan)					
Total					

HUBUNGAN KERJASAMA NON PEMERINTAH	Kelengkapan Dokumen			Skor	Uraian
	Cukup	Baik	Unggul		
1	2	3	4	5	6
Sinergi Program Kerja antar lembaga di internal MUI					
Kemitraan dengan Ormas Keagamaan					
Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri					
Kemitraan dengan lembaga internasional					
Total					

HUBUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH	Kelengkapan Dokumen			Skor	Uraian
	Cukup	Baik	Unggul		
1	2	3	4	5	6
Sarana dan Prasarana (kantor dan kelengkapan fasilitas)					
Program atau kegiatan sebagai bentuk dukungan pemerintah					
Total					

## BAB 3

### PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

#### A. Tim Penilai

Tim Asesor akan bekerja secara transparan, kongkrit, konsisten, obyektif dan akuntabel. Tim asesor terdiri dari:

- Penasehat : 1. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M  
(Ketua MUI Jawa Timur)
- : 2. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D  
(Sekretaris MUI Jawa Timur)
- Pengarah : 1. Prof. Dr. KH Abd. Halim Subahar, M.A  
2. Prof. Dr. Thohir Luth, M.A
- Anggota :
1. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I
  2. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag
  3. Dr. Listiono Santoso, M.Hum
  4. Dr. KH. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
  5. Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag
  6. Dr. H. Syarief Thayyib, M.Si
  7. Dr. H. Munawar, M.M
  8. Dr. KH. Abd. Wached, M.H.I
  9. Dr. H. Haqqul Yaqin, M.Ag
  10. Khoirul Rosyadi, S.S., MA, Ph.D
  11. Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag
  12. Dr. KH. Sofiyullah, MT
  13. Dr. H. Turmudzi Abror
  14. Dr. Ahmad Faiz Zainuddin, M.Sc
  15. Dr. H. Nur Syahroni
  16. Syafi'ul Anam, P.hD

#### B. Waktu Pelaksanaan Akreditasi

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Sosialisasi Program Akreditasi MUI Propinsi Jawa Timur	25 September – 3 Oktober 2022	
2	Pengunggahan Dokumen	25 September -18 Oktober 2022	
3	Desk Evaluasi	20 September - 25 Oktober 2022	
4	Visitasi	25 September– 15 Nopember 2022	
5	Validasi Akreditasi	16 Nopember-20 Nopember	



		2022	
6	Penerbitan SK Akreditasi	21 Nopember-25 Nopember 2022	
7	Malam Anugerah MUI Award tahun 2022	Minggu Ke-2 Desember 2022	

### C. Penghargaan

MUI Kabupaten/Kota yang mendapatkan skor terbaik dan catatan positif dari tim asesor akan dipilih sebagai organisasi yang memiliki kinerja unggul, baik dan cukup. Yang selanjutnya akan diberikan penghargaan sesuatu dengan keputusan hasil tim asesor berdasarkan hasil penilaian dan visitasi di lapangan.

#### Kategori Akreditasi dan Penghargaan

1. MUI Unggul Bidang Manajemen Organisasi
2. MUI Unggul Bidang Pelayanan
3. MUI Unggul Bidang Inovasi Dan Kepeloporan
4. MUI Unggul Bidang Kerjasama
5. MUI Unggul Bidang Dukungan Pemerintah
6. MUI Unggul Kategori Umum

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Pedoman ini digunakan sebagai kerangka acuan dalam menyelenggarakan kegiatan Akreditasi MUI Propinsi Jawa Timur di lingkungan MUI Propinsi Jawa Timur. Hal-hal yang belum tercantum dalam kerangka acuan ini akan dibuat kemudian jika diperlukan.

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN PENILAIAN AKREDITASI MUI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 2022**

No	Elemen	Indikator	Skor
1	SK Pengurus MUI	Memiliki SK periode yang berjalan dan SK periode sebelumnya atau SK MUI Kecamatan serta diarsip dengan baik	4
		Memiliki SK dan diarsip dengan baik	3
		Memiliki SK, namun belum diarsip	2
		Tidak atau belum memiliki SK Pengurus	1
2	Perencanaan: (renstra meliputi: visi, misi, tujuan, strategi, program kerja jangka menengah)	Memiliki visi misi tujuan strategi dan program yang berkelanjutan	4
		Memiliki visi misi tujuan strategi dan program	3
		Memiliki visi misi dan program	2
		Tidak memiliki visi misi dan program	1
3	Organisasi dan Tata Laksana (struktur dan susunan organisasi, tupoksi)	Memiliki struktur, susunan organisasi, tupoksi dan ditampilkan ke publik (misalnya; dinding)	4
		Memiliki struktur, susunan organisasi dan tupoksi masing-masing.	3
		Memiliki struktur dan susunan organisasi	2
		Tidak memiliki struktur dan susunan organisasi	1
4	Program Kerja dan Indikator Capaian (dokumen program kerja tahunan)	Memiliki program kerja dan ada indikator pencapaian serta evaluasinya	4
		Memiliki program kerja dan ada indikator pencapaian	3
		Memiliki program kerja, tapi tidak ada indikator pencapaian	2
		Tidak memiliki program kerja	1
5	Pengelolaan Keuangan (dokumen laporan keuangan, sumber keuangan)	Ada laporan keuangan dan sumber keuangan yang terdokumentasi dengan baik	4
		Ada laporan keuangan dan sumber keuangan	3
		Ada laporan keuangan	2
		Tidak ada laporan keuangan	1
6	Pelaporan Kinerja (dokumen LPJ kegiatan tahunan)	Ada laporan kegiatan tahunan dan 5 tahunan	4
		Ada laporan kegiatan tahunan	3
		Ada laporan kegiatan	2
		Tidak ada dokumen laporan kegiatan	1
7	Sumber Daya Manusia (pengurus harian, tenaga admin sekretariat)	Ada admin sekretariat dan pengurus harian yang setiap saat koordinasi	4
		Ada admin sekretariat dan pengurus harian	3
		Ada admin sekretariat	2
		Tidak ada admin sekretariat	1
8	Fatwa Keagamaan	Ada komisi fatwa yang aktif memberi fatwa sebagai respons atas masalah kontemporer dan aktif mengikuti ijtima ulama MUI	4
		Ada komisi fatwa yang memberi fatwa keagamaan sebagai respons atas masalah kontemporer	3
		Ada komisi fatwa yang memberi fatwa keagamaan	2



		Tidak pernah memberi fatwa keagamaan	1
9	Konsultasi Keagamaan	Ada konsultasi keagamaan yang dipersiapkan untuk melayani umat dan dirancang secara profesional	4
		Ada konsultasi keagamaan yang dipersiapkan untuk melayani umat	3
		Ada konsultasi keagamaan	2
		Tidak ada konsultasi keagamaan	1
10	Tausiyah (himbauan)	Ada tausiyah yang bersifat reguler merespons perkembangan sosial dan terdokumentasi dengan baik	4
		Ada tausiyah yang bersifat reguler	3
		Ada tausiyah	2
		Tidak ada tausiyah	1
11	Mubaligh/Dai	Ada mubaligh atau dai yang terlatih secara profesional di lingkungan MUI yang terdata dengan baik	4
		Ada mubaligh/dai yang terlatih secara profesional	3
		Ada mubaligh/dai	2
		Tidak ada mubaligh/dai	1
12	Kajian/Penelitian terhadap aliran keagamaan dan isu kontemporer	Ada kajian penelitian terhadap aliran keagamaan dan atau isu kontemporer yang terbukukan	4
		Ada kajian rutin penelitian terhadap aliran keagamaan dan atau isu kontemporer secara tematik	3
		Ada kajian penelitian terhadap aliran keagamaan dan atau isu kontemporer	2
		Tidak ada kajian penelitian terhadap aliran keagamaan dan atau isu kontemporer	1
13	Pendampingan Sertifikasi Halal	Ada pendampingan sertifikasi halal dengan jumlah produk UMKM 101 ke atas	4
		Ada pendampingan sertifikasi halal dengan jumlah produk UMKM 51-100	3
		Ada pendampingan sertifikasi halal dengan jumlah produk UMKM 1-50	2
		Tidak ada pendampingan sertifikasi halal	1
14	Pendampingan bagi Kelompok Rentan (perempuan, anak, masyarakat berpenghasilan rendah, pengangguran, muallaf, difabel dsb)	Pendampingan pada tiga atau lebih kelompok Rentan	4
		Pendampingan pada dua kelompok rentan	3
		Pendampingan pada satu kelompok rentan	2
		Tidak ada pendampingan	1
15	Program Unggulan	Ada program unggulan yang inovatif dan menjadi rujukan MUI Kabupaten/Kota lain	4
		Ada program unggulan yang inovatif dan membedakan dengan MUI Kabupaten/Kota lain	3
		Ada program unggulan yang inovatif	2
		Tidak ada program unggulan	1
16	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Teknologi	Ada medsos yang digunakan sebagai sarana dakwah MUI (Website, Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, Twitter)	4

	Digital (penggunaan medsos sarana dakwah)	Ada medsos yang digunakan sebagai sarana dakwah MUI (Facebook, Instagram, YouTube)	3
		Ada medsos yang digunakan sebagai sarana dakwah MUI (Facebook, Instagram)	2
		Tidak ada media sosial (medsos)	1
17	Bentuk kegiatan untuk Generasi MUIlenial	Ada banyak kegiatan rutin untuk generasi MUIlenial yang berskala lokal maupun regional	4
		Ada kegiatan rutin untuk generasi MUIlenial	3
		Ada kegiatan untuk generasi MUIlenial	2
		Tidak ada kegiatan untuk generasi MUIlenial	1
18	Pemanfaatan media cetak dan elektronik untuk berdakwah (Buletin, Majalah, TV, Radio dll)	Ada pemanfaatan media online, cetak dan elektronik untuk berdakwah	4
		Ada pemanfaatan media online dan cetak untuk berdakwah	3
		Ada pemanfaatan media online untuk berdakwah	2
		Tidak ada pemanfaatan media online, cetak dan elektronik untuk berdakwah	1
19	Menjadi Rujukan MUI Kabupaten/kota lainnya (studi banding pengelolaan)	Ada banyak study banding karena MUI memiliki banyak keunggulan	4
		Ada banyak study banding	3
		Sudah pernah ada study banding	2
		Belum pernah ada study banding	1
20	Sinergi Program Kerja antar lembaga di internal MUI	Sudah ada sinergi antar lembaga yang dibuktikan dengan rapat koordinasi dan program bersama yang terdokumentasi dengan baik	4
		Sudah ada sinergi antar lembaga yang dibuktikan dengan rapat koordinasi dan program bersama	3
		Sudah ada sinergi antar lembaga	2
		Belum ada sinergi antar lembaga	1
21	Kemitraan dengan Ormas Keagamaan	Sudah ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan dengan program bersama secara intensif dan berkelanjutan	4
		Sudah ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan dengan program bersama secara intensif	3
		Sudah ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan	2
		Belum ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan	1
22	Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	Sudah ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri dengan program bersama secara intensif dan berkelanjutan	4
		Sudah ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri dengan program bersama	3
		Sudah ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	2
		Belum ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	1
23	Kemitraan dengan lembaga internasional	Sudah ada kemitraan dengan lembaga internasional dengan program bersama secara intensif dan berkelanjutan	4
		Sudah ada kemitraan dengan lembaga internasional dengan program bersama secara	3
		Sudah ada kemitraan dengan lembaga internasional	2

		Belum ada kemitraan dengan lembaga internasional	1
24	Sarana dan Prasarana (kantor dan kelengkapan fasilitas)	Ada kantor, ruang pertemuan, ruang ketua, ruang sekretaris dan fasilitas penunjang administrasi	4
		Ada kantor dan ruang pertemuan	3
		Ada kantor	2
		Tidak punya kantor	1
25	Program atau kegiatan sebagai bentuk dukungan pemerintah	Sudah ada kemitraan dengan pemerintah dengan program bersama dan berkelanjutan	4
		Sudah ada kemitraan dengan pemerintah dengan program bersama	3
		Sudah ada kemitraan dengan pemerintah	2
		Belum ada kemitraan dengan pemerintah	1


## KODE ETIK

### A. ASESOR

1. Asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Asesor harus menolak setiap tawaran untuk terlibat dalam kegiatan pada MUI Kabupaten/Kota yang sedang diakreditasi minimal untuk masa satu tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
3. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses akreditasi
4. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.
5. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan pengurus MUI Jawa Timur
6. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
7. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada pengurus harian MUI Jawa Timur

### B. Validator:

1. Validator harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan MUI Kabupaten/Kota yang akan divalidasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Validator harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di MUI Kabupaten/Kota yang sedang divalidasi
3. Validator harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi MUI Kabupaten/Kota yang divalidasi.
4. Validator harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil validasi.

- 
5. Validator tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan validasi.
  6. Validator tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai validator
  7. Validator dapat melakukan validasi secara offline atau online.

### **C. ASESI**

1. Asesi tidak membiayai kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas.
2. Asesi tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada asesor yang bertugas.
3. Asesi tidak melakukan penjemputan dari bandara/stasiun/lokasi kedatangan ke hotel atau ke lokasi asesi kepada asesor yang bertugas selama lokasi asesi masih dimungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia.
4. Asesi tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun kepada asesor yang sedang bertugas.
5. Asesi tidak merekayasa dan memanipulasi data, perangkat, dan SDM yang diperlukan saat kegiatan visitasi berlangsung.